

Efektivitas Pemberian Insentif Fiskal Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Rikson Paputungan^{1*}, Ariawan², Darnawati³, Gaffar⁴

¹²³Magister Manajemen, Pascasarjana, Universitas Ichsan Gorontalo

⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo

*¹Paputunganrikson09@gmail.com,

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pemberian insentif fiskal dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui pendekatan sumber, proses, dan sasaran. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan observasi, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana cukup memadai, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Terdapat kendala koordinasi lintas sektor dan transparansi dalam implementasi program. Meski angka kemiskinan ekstrem berkurang, sistem penentuan sasaran perlu ditingkatkan. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan sistem evaluasi yang komprehensif dalam pengelolaan insentif fiskal untuk efektivitas program penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Kata kunci: Insentif Fiskal; Kemiskinan Ekstrem; Efektivitas Kebijakan; Koordinasi Lintas Sektor; Transparansi;

Abstract. This research aims to analyze the effectiveness of fiscal incentives in reducing extreme poverty in South Bolaang Mongondow Regency through the source, process, and target approaches. The method used is qualitative with observation, documentation study, and in-depth interviews with various related parties, including the local government and beneficiaries. The results showed that the allocation of funds was adequate, but the implementation was not optimal. There are obstacles to cross-sector coordination and transparency in program implementation. Although the extreme poverty rate has been reduced, the targeting system needs to be improved. The implications of this study emphasize the importance of transparency, accountability, and a comprehensive evaluation system in the management of fiscal incentives for the effectiveness of extreme poverty reduction programs.

Keywords: fiscal incentives; extreme poverty; policy effectiveness; cross-sector coordination; transparency;

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan tantangan utama di Indonesia, terutama kemiskinan ekstrem yang melibatkan ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Berbagai ide dan konsep tentang kemiskinan telah dipelajari dan diadaptasi di berbagai negara berkembang, tetapi dengan pandangan yang tidak memuaskan. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara berkembang masih menderita kemiskinan. Todaro & Smith (2006) menjelaskan bahwa kemiskinan muncul karena adanya sejumlah penduduk yang tidak mampu untuk memperoleh sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kondisi ini merupakan penyebab dari turunnya kualitas sumber daya manusia yang mengakibatkan pada penurunan produktivitas dan pendapatan, sehingga masyarakat tidak akan sejahtera.

Upaya penanggulangan kemiskinan ini telah tercantum dalam tujuan negara (Pembukaan UUD 1945) dan lebih spesifik termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 19, 20, 21 tentang penanggulangan kemiskinan yang berisi bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau

mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Program penanggulangan kemiskinan disusun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berarti dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan dilakukan penentuan prioritas berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingan sehingga implementasi program akan terlaksana secara efektif dan efisien (Azwar, 2014). Dalam rangka mengurangi kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah sehingga diatur dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 04 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Angka kemiskinan ekstrem di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 angka kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 26,50 juta jiwa dan pada tahun 2022 angka kemiskinan ekstrem di Indonesia juga menurun menjadi 20,01 juta jiwa dan terus menurun di tahun 2023 menjadi 18,19 juta jiwa. Walaupun angka kemiskinan ekstrem setiap tahunnya selalu mengalami penurunan, namun hal ini tetap masih menjadi sesuatu yang harus diperhatikan.

Indonesia memiliki 38 provinsi yang salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Sulawesi Utara adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di pulau Sulawesi dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2023, angka kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sangat tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Sulawesi Utara dan menempati posisi ke 15 daerah termiskin di Sulawesi Utara.

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menempati posisi tertinggi dalam tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara, meskipun telah terjadi penurunan angka sejak pemekaran wilayah pada 2008. Untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah pusat memberikan insentif fiskal sebagai bagian dari kebijakan nasional. Namun, efektivitas kebijakan ini perlu dievaluasi, terutama dalam aspek sumber daya, pelaksanaan, dan ketepatan sasaran. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan insentif fiskal ini tepat sasaran dan dikelola dengan baik. Evaluasi berkala dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Menurut Hari Lubis dan Martani Huseini (2009) mengatakan terdapat 3 pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas pemberian insentif fiskal yaitu pendekatan sumber, pendekatan proses, dan pendekatan sasaran.

Dengan demikian, kebijakan pemberian insentif fiskal dapat menjadi salah satu solusi efektif dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana insentif fiskal tersebut mampu mengurangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dilihat berdasarkan pendekatan sumber, pendekatan proses, dan pendekatan sasaran.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor dalam Gunawan (2022) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menggunakan metode studi kasus untuk mendalami efektivitas pemberian insentif fiskal dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Studi kasus merupakan suatu metodologi penelitian yang menggunakan bukti empiris (bukan hasil

eksperimen laboratorium) untuk membuktikan apakah suatu teori dapat diimplementasikan pada suatu kondisi atau tidak (Sarosa, 2012).

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, termasuk observasi langsung di lapangan untuk memahami kondisi aktual masyarakat dan implementasi kebijakan. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan dengan meninjau berbagai laporan resmi pemerintah serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang memberikan gambaran mengenai tren kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Wawancara mendalam juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini, di mana informan diwawancarai untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif. Proses ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai alokasi, distribusi, dan dampak dana insentif fiskal dari sudut pandang berbagai pihak terkait.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan fokus pada bagaimana kebijakan diimplementasikan dan sejauh mana program tersebut berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu mengurangi kemiskinan ekstrem. Analisis ini memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang dalam pelaksanaan kebijakan, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan insentif fiskal merupakan salah satu strategi yang diadopsi oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sulawesi Utara, efektivitas kebijakan ini menjadi kunci dalam upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan. Penelitian ini mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut melalui tiga pendekatan utama: sumber, proses, dan sasaran. Pendekatan ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai sejauh mana kebijakan insentif fiskal mampu mengatasi permasalahan kemiskinan dengan memaksimalkan sumber daya, mengoptimalkan mekanisme pelaksanaan, serta memastikan manfaat program mencapai kelompok sasaran yang paling membutuhkan. Berikut adalah temuan dan diskusi yang diuraikan berdasarkan ketiga pendekatan tersebut.

Pendekatan Sumber

Pendekatan sumber berfokus pada ketersediaan input yang digunakan untuk melaksanakan program. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa alokasi dana insentif fiskal sebesar Rp. 6.313.683.000 telah diterima oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dana ini digunakan sebagai bagian dari kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Meskipun alokasi ini mencukupi untuk mendanai program-program utama, akan tetapi beberapa hambatan terkait dengan pengelolaan sumber daya masih terjadi, seperti kurangnya integrasi lintas sektor dalam memanfaatkan dana yang ada secara maksimal. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah guna meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program.

Dana insentif fiskal dari pemerintah pusat dialokasikan cukup besar. Namun, terdapat keterbatasan dalam distribusi dan penggunaan dana di tingkat daerah. Hambatan utama adalah kurangnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara transparan dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk sekretaris daerah, kepala bappelitbangda serta masyarakat sebagai penerima layanan di kabupaten bolaang mongondow selatan menunjukkan bahwa efektivitas pemberian insentif fiskal melalui pendekatan sumber sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk memperoleh dana yang memadai dan mengalokasikannya secara tepat.

Pendekatan sumber dalam mengukur efektivitas pemberian insentif fiskal berfokus pada kemampuan organisasi dalam hal ini pemerintah daerah untuk memperoleh, mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal penanggulangan kemiskinan ekstrem di kabupaten bolaang mongondow selatan, pendekatan ini berpusat pada bagaimana pemerintah daerah mengamankan dana dari berbagai sumber, terutama transfer pemerintah pusat untuk menjalankan program-program pengentasan kemiskinan. Pendekatan ini dijelaskan melalui *resource dependence theory* yang menekankan pentingnya kemampuan organisasi untuk membangun hubungan eksternal yang efektif guna memperoleh sumber daya yang sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam kerangka *resource dependence theory*, hubungan antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci utama keberhasilan pendekatan sumber. Pemerintah daerah di kabupaten bolaang mongondow selatan sangat bergantung pada dana transfer seperti dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana desa, karena keterbatasan pendapatan asli daerah (PAD). Ketergantungan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola kemiskinan ekstrem sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka mampu menyusun proposal anggaran yang sesuai dengan prioritas nasional. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa alokasi dana sering kali tidak mencerminkan kebutuhan spesifik masyarakat miskin ekstrem. Misalnya dana untuk pembangunan infrastruktur terkadang lebih banyak dialokasikan untuk proyek berskala besar yang kurang relevan bagi komunitas miskin yang membutuhkan akses langsung ke fasilitas dasar seperti air bersih atau layanan kesehatan. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menganalisis kebutuhan lokal dan menyelaraskannya dengan prioritas anggaran pusat. Dalam hal ini, *resource dependence theory* memberikan wawasan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat hubungan dengan pemerintah pusat melalui komunikasi yang lebih baik, termasuk dalam menyampaikan urgensi kebutuhan masyarakat miskin ekstrem secara data driven dan berbasis bukti.

Selain hubungan eksternal, efektivitas pendekatan sumber juga sangat bergantung pada kapasitas internal pemerintah daerah dalam mengelola dana yang diperoleh. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa meskipun dana tersedia, pelaksanaan program sering kali terkendala oleh lemahnya kapasitas birokrasi, perencanaan yang kurang matang dan pengawasan yang terbatas. Misalnya banyak program yang dirancang tanpa melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga alokasi dana tidak selalu sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam hal ini, *resource dependence theory* menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan sumber daya internal secara efektif. Pemerintah daerah perlu membangun sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan partisipatif untuk memastikan bahwa dana yang tersedia benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin ekstrem. Pendekatan partisipatif tidak hanya meningkatkan efektivitas alokasi dana tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah daerah dimata masyarakat.

Ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat menimbulkan risiko ketidakstabilan pendanaan, terutama jika terjadi perubahan kebijakan nasional yang berdampak pada alokasi anggaran. Dalam hal ini, diversifikasi sumber pendanaan menjadi salah satu strategi yang perlu dikembangkan oleh pemerintah daerah. Pendekatan seperti memanfaatkan dana *corporate social responsibility* (CSR) dari perusahaan swasta atau menjalin kemitraan dengan organisasi internasional dapat membantu mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah pusat. Diversifikasi ini sejalan dengan prinsip *resource dependence theory* yang menyarankan bahwa organisasi harus memperluas jaringan sumber daya mereka untuk mengurangi ketergantungan pada satu pihak. Kabupaten Bolaang Mongondow selatan dapat memanfaatkan potensi lokal seperti sektor pariwisata atau agrikultur untuk menarik investasi

atau sumber pendanaan alternatif yang dapat digunakan untuk program pengentasan kemiskinan.

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah mismatch antara dana yang dialokasikan dengan kebutuhan riil masyarakat miskin ekstrem. Kondisi ini menunjukkan kurangnya perencanaan berbasis data yang akurat. Resource dependence theory menekankan bahwa organisasi harus memahami lingkungan eksternalnya untuk mengoptimalkan sumber daya yang diperoleh. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem data yang komprehensif dan real time untuk memetakan kebutuhan masyarakat secara detail. Data ini tidak hanya membantu dalam menyusun proposal anggaran yang lebih baik tetapi juga memastikan bahwa alokasi dana dapat diarahkan secara tepat sasaran.

Pendekatan Proses

Proses pelaksanaan program menghadapi tantangan koordinasi antar instansi. Program tidak selalu berjalan sesuai perencanaan karena kurangnya sinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait. Transparansi dalam pelaksanaan program juga perlu ditingkatkan agar dana tepat sasaran. Pendekatan proses menilai efektivitas mekanisme internal dan eksekusi program.

Hasil wawancara terkait pendekatan proses dalam pemberian insentif fiskal untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem di kabupaten bolaang mongondow selatan memberikan gambaran mendalam tentang mekanisme organisasi, koordinasi antar pemangku kepentingan serta pelaksanaan program yang bertujuan untuk mencapai target pengentasan kemiskinan. Pendekatan ini menilai efektivitas pemberian insentif fiskal berdasarkan sejauh mana proses pelaksanaan program dilakukan secara efisien, akuntabel dan partisipatif. Berdasarkan hasil wawancara dengan bappelitbangda, sekretaris daerah dan masyarakat ditemukan bahwa pelaksanaan program insentif fiskal masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari sisi pemerintah daerah, koordinasi lintas sektor sering kali menjadi kendala utama. Beppelitbangda menjelaskan bahwa meskipun perencanaan telah dilakukan secara menyeluruh, pelaksanaannya sering terhambat oleh kurangnya sinkronisasi antar dinas terkait. Misalnya dalam program penyediaan bantuan sosial berbasis data, dinas sosial yang bertugas menyalurkan bantuan sering kali menerima data yang kurang akurat dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini menyebabkan beberapa masyarakat miskin ekstrem tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka terima.

Disisi lain, sekretaris daerah menggarisbawahi pentingnya keterlibatan pemerintah pusat dalam memberikan pedoman teknis yang lebih jelas terkait mekanisme pelaksanaan program. Panduan tersebut, menurutnya sering kali bersifat umum sehingga menyulitkan pemerintah daerah dalam menyesuaikan implementasi dengan kondisi lokal. Sebagai contoh, meskipun program padat karya tunai telah dicanangkan sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem, mekanisme pelaksanaannya masih belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan spesifik masyarakat miskin di pedesaan, seperti aksesibilitas terhadap lokasi program dan keterbatasan keterampilan tenaga kerja lokal. Sementara itu, masyarakat miskin yang diwawancarai menyatakan bahwa proses pelaksanaan bantuan sering kali tidak melibatkan mereka dalam perencanaan maupun pengawasan. Akibatnya, program-program yang dijalankan kurang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dari perspektif system theory, pendekatan proses dalam pemberian insentif fiskal seharusnya melibatkan semua elemen dalam sistem termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas terkait dan masyarakat. Sistem yang efektif ditandai dengan adanya alur informasi yang lancar, koordinasi yang solid serta umpan balik dari seluruh pemangku kepentingan untuk perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks kabupaten bolaang mongondow selatan, hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem yang ada masih mengalami disfungsi

pada beberapa elemen terutama dalam aspek koordinasi antar dinas dan keterlibatan masyarakat.

Ketidakharmonisan dalam koordinasi lintas sektor dapat dianalogikan sebagai gangguan dalam aliran informasi dalam sebuah sistem. Dalam system theory hal ini dapat menyebabkan bottle necking atau penyumbatan yang menghambat fungsi keseluruhan sistem. Misalnya jika dinas sosial tidak menerima data yang akurat dari dinas kependudukan, maka distribusi bantuan tidak dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Masalah ini dapat diatasi dengan memperkuat sistem integrasi data melalui teknologi informasi, sehingga data dari berbagai dinas dapat diakses dan diverifikasi secara real time.

Partisipasi masyarakat juga merupakan elemen penting dalam pendekatan proses. Dalam system theory masyarakat adalah bagian dari lingkungan eksternal yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem organisasi. Ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, maka umpan balik yang esensial untuk penyempurnaan sistem menjadi hilang. Hal ini sejalan dengan temuan wawancara dimana masyarakat merasa tidak didengar dan kebutuhan mereka tidak sepenuhnya dipenuhi oleh program pemerintah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu mengembangkan mekanisme konsultasi dan partisipasi yang lebih inklusif seperti forum diskusi atau survei kebutuhan masyarakat sebelum program dirancang.

Lebih lanjut, process theory juga menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam pelaksanaan program. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif, dimana program dapat disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, mekanisme pendampingan yang berkelanjutan perlu ditingkatkan untuk memastikan masyarakat dapat memanfaatkan bantuan secara optimal. Pendampingan ini tidak hanya mencakup aspek teknis tetapi juga aspek sosial seperti membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kemandirian ekonomi.

Teori proses melihat organisasi dan kebijakan sebagai salah satu rangkaian langkah yang harus dijalankan secara terorganisir dan terkoordinasi. Van de Ven menyatakan bahwa proses yang efektif memerlukan komunikasi yang baik, pengelolaan sumber daya yang optimal dan kemampuan untuk menanggapi perubahan dalam lingkungan eksternal. Dalam hal pemberian insentif fiskal, proses tersebut meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program yang berkelanjutan. Setiap tahapan ini harus dilaksanakan dengan cermat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan sukses dan memberi dampak positif terhadap sasaran yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Penelitian terdahulu yang mendukung temuan ini dilakukan oleh Smith et al (2015) yang menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang berhasil dalam mengurangi kemiskinan tidak hanya bergantung pada alokasi dana yang besar tetapi lebih pada bagaimana dana tersebut dikelola dan disalurkan secara tepat waktu dan efektif. Hal ini serupa dengan penelitian Johnson dan Carter (2017) yang menekankan bahwa koordinasi antara lembaga pemerintahan dan organisasi masyarakat sipil dalam pelaksanaan program fiskal merupakan faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian oleh Li et al (2020) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang dapat beradaptasi dengan perubahan situasi lapangan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mengatasi masalah kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan insentif fiskal di kabupaten bolaang mongondow selatan juga harus mengintegrasikan proses evaluasi dan adaptasi untuk memastikan keberhasilannya dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa koordinasi lintas sektor dan transparansi pelaksanaan program belum optimal. Kekurangan ini tercermin pada tidak sinkronnya strategi pelaksanaan di antara instansi yang terkait, sehingga mempengaruhi efisiensi program.

Contoh nyata adalah adanya ketidaksesuaian antara data penerima manfaat yang ditetapkan melalui SK Bupati dengan implementasi di lapangan. Proses evaluasi dan monitoring juga dilaporkan kurang terstruktur, yang mengakibatkan minimnya data akurat untuk mengukur hasil jangka menengah dan panjang dari kebijakan insentif fiskal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan proses memerlukan penguatan melalui perencanaan yang lebih komprehensif dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengawasan

3. Pendekatan Sasaran

Pendekatan ini berfokus pada sejauh mana sasaran program tercapai. Temuan penelitian menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dari 18,81% pada tahun 2010 menjadi 12,04% pada tahun 2023. Namun, meskipun terjadi perbaikan, sistem penentuan sasaran dianggap kurang tepat karena belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat yang paling membutuhkan.

Hasil analisis mengenai penerapan pendekatan sasaran dalam pemberian insentif fiskal di kabupaten bolaang mongondow selatan menunjukkan bahwa meskipun ada alokasi anggaran yang signifikan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem, pencapaian target sasaran belum sepenuhnya optimal. Pendekatan sasaran berfokus pada hasil yang ingin dicapai, yakni pengurangan angka kemiskinan ekstrem. Dalam hal ini, keberhasilan suatu kebijakan diukur dengan sejauh mana sasaran yang telah ditetapkan tercapai, terutama dalam hal pengurangan jumlah penduduk miskin dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan berbagai pihak termasuk bappelitbangda, sekretaris daerah dan masyarakat mengungkapkan bahwa walaupun kebijakan insentif fiskal telah dijalankan dengan baik dalam hal distribusi bantuan, masih terdapat kesenjangan dalam hal penentuan dan penargetan penerima bantuan yang tepat sasaran. Salah satu faktor utama yang diungkapkan oleh informan adalah ketidaktepatan data dalam mendeteksi dan mengidentifikasi keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Dalam beberapa kasus, bantuan tersebut tidak sampai kepada masyarakat miskin ekstrem yang seharusnya menjadi penerima utama, sementara sebagian kelompok yang tidak membutuhkan justru mendapatkan manfaat dari program tersebut. Ini mencerminkan kurangnya akurasi dalam pengumpulan data dan analisis kebutuhan sosial sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Goal setting theory yang dikemukakan oleh Locke dan Latham (2002) menjadi sangat relevan. Menurut teori ini, pencapaian sasaran yang efektif dapat dicapai apabila sasaran yang ditetapkan spesifik, terukur dan dapat dicapai serta didukung oleh komitmen untuk mencapainya. Dalam hal kebijakan insentif fiskal di kabupaten bolaang mongondow selatan, meskipun sasaran pengurangan kemiskinan ekstrem telah jelas, terdapat masalah pada proses penentuan sasaran yang tepat dan pemantauan berkelanjutan terhadap perkembangan masyarakat penerima bantuan. Locke dan Latham menekankan bahwa pentingnya perumusan tujuan yang jelas dan terukur dapat mendorong pihak yang terlibat dalam kebijakan untuk berusaha lebih keras mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki mekanisme penargetan penerima bantuan serta menyusun indikator yang lebih spesifik dan relevan untuk mengukur keberhasilan kebijakan.

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi yang terbatas terhadap implementasi insentif fiskal berkontribusi terhadap ketidaksesuaian antara tujuan dan hasil yang dicapai. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun alokasi dana telah dilakukan, proses pengawasan terhadap penggunaan dana dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat tidak selalu berjalan dengan baik. Teori ini menggarisbawahi bahwa pencapaian hasil yang optimal memerlukan evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan guna memastikan apakah sasaran yang ditetapkan sudah tercapai dan apakah ada penyesuaian yang

diperlukan dalam implementasi kebijakan tersebut. Tanpa evaluasi yang cukup, sulit bagi pemerintah daerah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut benar-benar efektif dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem.

Penelitian terdahulu juga mendukung temuan ini. Beberapa studi menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pengurangan kemiskinan sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan penggunaan data yang akurat. Penelitian oleh Kim, S., & Kim, N. (2020) menunjukkan bahwa penggunaan data yang tidak akurat dalam penentuan penerima bantuan sosial berpotensi menurunkan efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Amin (2015) yang menekankan bahwa kebijakan sosial yang tidak disertai dengan pemantauan dan evaluasi yang baik sering kali gagal mencapai hasil yang diinginkan.

Selain itu, penelitian oleh McCord (2012) menunjukkan bahwa ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial sangat berpengaruh terhadap efektivitas program. Dalam konteks kebijakan insentif fiskal di kabupaten bolaang mongondow selatan, penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran menyebabkan ketimpangan dalam distribusi manfaat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perbaikan dalam pengumpulan dan pemanfaatan data sosial serta pengembangan mekanisme monitoring yang lebih baik guna memastikan bahwa bantuan sosial sampai ke pihak yang paling membutuhkan.

Penerapan goal setting theory dalam konteks kebijakan pemberian insentif fiskal ini dapat memperbaiki efektivitas kebijakan dengan menetapkan tujuan yang lebih terukur dan spesifik, serta menciptakan sistem evaluasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Dengan perumusan tujuan yang jelas dan didukung dengan pengumpulan data yang akurat serta adanya evaluasi berkelanjutan, kebijakan insentif fiskal di kabupaten bolaang mongondow selatan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu pengurangan kemiskinan ekstrem yang lebih efektif.

Data penerima manfaat masih mengandalkan survei berbasis kriteria yang tidak selalu relevan dengan kondisi faktual masyarakat. Akibatnya, beberapa kelompok yang berhak belum menerima manfaat secara maksimal, sedangkan beberapa yang tidak termasuk kategori prioritas mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan sistem targeting berbasis data yang lebih dinamis dan inklusif.

Penurunan angka kemiskinan ekstrem menunjukkan dampak positif insentif fiskal. Namun, proses penentuan penerima manfaat belum sepenuhnya akurat. Evaluasi sistem pendataan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Simpulan

Pemberian insentif fiskal telah berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Namun, efektivitas program masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan koordinasi, transparansi, dan akurasi penentuan sasaran. Penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengindikasikan adanya dampak positif dari kebijakan insentif fiskal, namun evaluasi lebih komprehensif diperlukan untuk memastikan keberlanjutan manfaat dalam jangka panjang.

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi dalam pengelolaan insentif fiskal, serta pengembangan sistem evaluasi yang lebih matang. Dengan implementasi yang tepat, kebijakan insentif fiskal memiliki potensi untuk menjadi alat yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tertinggal. Rekomendasi utama adalah meningkatkan akuntabilitas dan melakukan evaluasi menyeluruh.

Referensi

- Azwar, B. (2014). Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kampar (Studi Tentang Efektifitas Bantuan Dana Bergulir Sektor Agribisnis). *Menara Riau*, 13(1), 102-117.
- Kim, S., & Kim, N. (2020). "A social cost-benefit analysis of the vehicle restriction policy for reducing overtourism in Udo, Korea". *Sustainability (Switzerland)*, 12(2). <https://doi.org/10.3390/su12020612>.
- Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.”. *Jakarta, RI*.
- Indonesia, R. (2003). Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Duta Nasindo Semarang.
- Indonesia, M. S. R. (2022). Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Tentang Kriteria Fakir Miskin (Nomor 262/HUK/2022).
- Lubis & Husain, 2009. Efektivitas Pelayanan Publik, Cetaka Kesebelas Pustaka Binaman Presindo. Jakarta.
- Locke, E.A., Latham G.P. (2002). Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation. A 35-Year Odyssey. *American Psychologist*.
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Sarosa, S. (2012). Penelitian kualitatif dasar-dasar. *Jakarta: Indeks*.
- Smith, Catherine J.; Donaldson, John A.; Mudaliar, Sanushka; Md Kadir, Mumtaz; and Yeoh, Lam Keong. A handbook on inequality, poverty and unmet social needs in Singapore. (2015). 1-86.
- Todaro, M. P dan Smith Stephen C, 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.